



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

**PROGRAM
PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN**

**KEGIATAN
PEMBINAAN POTENSI KAWASAN
MASYARAKAT PERDESAAN/NAGARI**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan Kawasan Perdesaan merupakan pembangunan yang dilakukan oleh dua Nagari atau lebih yang bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Desa nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 83 ayat 2 dan ayat 3, serta tertuang pada Pasal 3,4 pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, yang diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.

Dengan adanya ketentuan dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sudah membentuk 4 kawasan perdesaan yaitu 1). Kecamatan Sutera dengan nomor SK 050/492/Kpts/BPT-PS/2016 pada tanggal 26 Oktober 2016 dengan tema kawasan yaitu Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian Terpadu dengan Komoditi Unggulan Budidaya Sapi Potong, 2) Kecamatan Silaut dengan nomor SK 050/283/Kpts/BPT-PS/2017 yang ditetapkan pada tanggal 29 Mei 2017 dengan tema kawasan yaitu Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Integrasi Perkebunan Sawit dan Ternak Sapi Bali, 3) Kecamatan Koto XI Tarusan dengan nomor SK 050/402/Kpts/BPT-PS/2017 yang ditetapkan pada tanggal 6 September 2017 dengan tema kawasan yaitu Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Industri Pariwisata, dan 4) Kecamatan Batang Kapas dengan Nomor SK 050/209/Kpts/BPT-PS/2019 yang ditetapkan pada tanggal 29 Maret 2019 dengan tema kawasan yaitu Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Padi dan Durian yang Terintegrasi dengan Pariwisata.

Pengembangan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Pesisir Selatan masuk dalam Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yaitu Kawasan Perdesaan Berbasis Industri Pariwisata di Kecamatan Koto XI Tarusan sejak tahun 2017 sampai tahun 2019. Dengan masuknya dalam Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional tersebut maka intervensi dari Pemerintah Pusat khususnya dari

Direktorat Jendral Pembangunan Kawasan Perdesaan, setiap tahun mendapatkan bantuan untuk pengembangan Kawasan yang telah terbentuk.

Tapi pada tahun 2019 bantuan dari Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan mengalami pembatalan. Hal ini disebabkan karena adanya permasalahan Status Tanah Pembangunan Amphiteater pada tahun 2018. Pembatalan bantuan tahun 2019 diketahui Dinas DPMDPPKB pada bulan juli 2019 secara lisan dari Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. Dan pada tanggal 4 Oktober 2019 Direktur Ekonomi Pengembangan Kawasan Perdesaan telah menyampaikan secara langsung terhadap pembatalan Bantuan tahun 2019 sekaligus mengunjungi Pasar Kawasan yang telah dibangun tahun 2018.

Pada tahun 2020 secara umum 4 kawasan tersebut memanfaatkan pernyataan modal dari nagari yang bersangkutan yang difasilitasi BKAN dan dikelola oleh Bumrag Bersama.

1.2 Kegiatan yang dilaksanakan

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 adalah:

- a. Pembinaan dan monitoring terhadap 4 Kawasan yang telah dibentuk,
- b. Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Kerjasama Antar Nagari.
- c. Pembinaan dan Pengawasan terhadap bantuan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Adapun maksud dari Program pengembangan Kawasan Perdesaan pada kegiatan pembinaan Potensi Masyarakat Kawasan Perdesaan adalah untuk mengupayakan percepatan Pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat Nagari/Desa, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang telah ditetapkan. Serta mendorong masyarakat dan pemerintah Nagari untuk saling mendukung dalam pengembangan ekonomi antar nagari maupun dengan pihak ketiga.

b. Tujuan

Tujuan dari Program Pengembangan Kawasan Perdesaan adalah :

- ✓ Membina Kawasan yang telah terbentuk sehingga kawasan tersebut terus berkelanjutan,
- ✓ Memotivasi Badan Kerja Sama Antar Nagari (BKAN) untuk terus menggali potensi Nagari utk pengembangan ekonomi masyarakat.
- ✓ Membina Badan Usaha Milik Nagari Bersama dalam upaya pengembangan ekonomi di Kawasan Perdesaan.

1.4 Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan program pengembangan kawasan perdesaan kegiatan Pembinaan Potensi kawasan masyarakat perdesaan/nagari dilaksanakan selama 1 tahun anggaran. Karena adanya musibah Covid-19 maka pelaksanaan kegiatan hanya dilaksanakan yaitu dari tanggal 1 Januari s.d tanggal 31 Marret 2020, dan Bulan Oktober sampai dengan Desember 2020

1.5 Dasar Program dan Kegiatan

Adapun Dasar dari pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Perdesaan kegiatan pembinaan Potensi Kawasan Masyarakat Perdesaan/Nagari adalah :

- ✓ UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terdapat pada pasal 83 s.d 94 yang bertujuan untuk Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- ✓ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- ✓ Keputusan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor 14/DPKP/SK/07/2016 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- ✓ Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 709/26/Kpt/BPT-PS/2020 tanggal 8 Januari 2020 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pemberdayaan

masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun anggaran 2020

- ✓ Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2020 Nomor: 410/02/SK/DPMDPPKB-PS/2020 tanggal 9 januari 2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2020.

BAB II

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam rangka membangun kawasan perdesaan yang telah dibentuk, Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah melaksanakan pembinaan dan monitoring terhadap 4 kawasan, dari 4 kawasan tersebut ada 3 kawasan yang belum menerima bantuan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. Dimana kawasan tersebut telah terbentuk Badan Kerja Sama Antar Nagari (BKAN) dan Badan Usaha Milik Nagari Bersama (BUMNagMa) melalui Musyawarah Antar Nagari (MAN)

3.1 Pembinaan dan monitoring terhadap 4 Kawasan yang telah dibentuk

Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan telah melakukan pembinaan dan monitoring ke 4 lokasi kawasan yang telah dibentuk. Dari ke 4 kawasan yang telah dibentuk yang paling sering dikunjungi adalah kawasan Industri Pariwisata di Kecamatan Koto XI Tarusan sebanyak 3 kali perjalanan, Kecamatan Sutera sebanyak 2 kali perjalanan, Kecamatan Batang Kapas sebanyak 2 kali perjalanan dan Kecamatan Silaut sebanyak 2 kali perjalanan.

a. Kecamatan Koto XI Tarusan

Kecamatan ini adalah Kecamatan yang Kawasannya termasuk Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional sehingga perlunya pembinaan terhadap Kawasan tersebut, khususnya terhadap BUMNag Bersama Mandeh Tarusan Jaya sebagai motor penggerak ekonomi dan Penerima Bantuan Dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. Adapun bantuan yang dibina adalah Bantuan Pasar Kawasan, Rumah Pajang, Mobil, Wahana Bermain Anak-anak dan Amphiteater.

Berdasarkan laporan yang diterima tentang Rencana Anggaran Tahun 2020 akan melaksanakan kegiatan Musyawarah Antar Nagari BUMNag Bersama, Evaluasi Wahana Permainanm Laut, dan Penambahan penjualan

Rumah Panjang. Ternyata berdasarkan kondisi lapangan sampai Desember 2020 tidak terlaksana, hal ini disebabkan Covid 19.

Dari beberapa jenis bantuan tersebut salah satu bantuan diantaranya pembangunan Amphiteater sebelumnya mengalami Gugatan terhadap Status Tanah, dan tahun 2020 telah selesai persidangan pengadilan dengan hasil Amphiteater milik Nagari / pemerintah.

Pembinaan juga dilakukan terhadap bantuan Pasar Kawasan di Nagari Jinang Kampung Pansur, dan sampai kondisi 31 Desember 2020 pasar tersebut dikelola oleh BUMNag Bersama. Pasar Kawasan tersebut dalam kondisi kosong dan sangat perlu perhatian dari pihak Nagari dan Kecamatan. Menurut Manager BUMNag Bersama ada rencana untuk melakukan musyawarah setelah Covid-19 tentang memanfaatkan kembali pasar kawasan.

Pembinaan terhadap Rumah Pajang, adapun pembinaan tersebut telah diberikan arahan terhadap pengelolaan rumah pajang, dan pengelola khususnya BUMNag Bersama Mandeh Tarusan Jaya. Pada awal pengelolaan Rumah Pajang masih kurang dari yang seharusnya, dan pengelola akan menyediakan kekurangan barang tersebut. dan kondisi 31 Desember 2020 rumah pajang tersebut dalam kondisi yang sangat perlu diperhatikan, karena sudah ada barang kadaluarsa dan juga kontrakan rumah pajang sudah habis, untuk sementara sekarang pindah ke nagari Duku.

Kepengurusan BUMNag Bersama Mandeh Tarusan Jaya baru dipilih pada Bulan Juli 2019 berdasarkan Musyawarah Antar Nagari. Dan sudah di SK kan dengan Keputusan Bersama Wali Nagari. Dalam pergantian pengurus BUMNag Bersama Mandeh Tarusan Jaya sudah melakukan pendataan Aset, dan Aset tersebut sudah diserahkan kepengurus yang baru.

b. Kecamatan Batang Kapas

Kawasan Perdesaan di Kecamatan Batang Kapas terbentuk pada tanggal 24 Maret 2019, setelah terbentuknya kawasan tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah mengadakan Musyawarah Antar Nagari untuk Pembentukan Badan Kerjasama Antar Nagari yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2019. Dan pada tanggal 27 November 2019 telah diadakan pembentukan BUMNag

Bersama sebagai lembaga pengelola ekonomi kawasan perdesaan yang telah dibentuk.

Adapun nama dari BUMNag Bersama Batang Kapas adalah BUMNag Bersama Batang Kapas Maju. dan Nagari dikecamatan Batang Kapas telah menyediakan Anggaran sebagai penyertaan Modal Nagari sebagai kontribusi dalam pengembangan ekonomi Kawasan. Berdasarkan laporan yang diterima BUMNag Bersama dan kecamatan merencanakan pernyataan modal untuk tahun 2020 yang akan dipergunakan untuk Perencanaan Dokumen Pendukung PKP di kecamatan Batang Kapas.

c. Kecamatan Sutera

Kawasan di Kecamatan Sutera, tidak berjalan dengan semestinya dan BUMNag Bersama hanya mengelola Bantuan Mobil Mini Bus. Hal ini perlu perhatian dari berbagai pihak kecamatan dan kabupaten, sehingga Bumrag Bersama yang telah dibentuk mampu berkiprah untuk peningkatan usaha masyarakat kawasan.

d. Kecamatan Silaut

Kawasan di Kecamatan Silaut, berjalan dengan baik, karena pemerintah kecamatan dan Nagari sangat kompak dalam pengembangan Sapi. Hal ini dibuktikan dengan telah dilakukan Studi banding Nagari ke luar daerah. dan telah dilakukan pengkajian dari Universitas Andalas terhadap Pakan ternak yang cocok bagi pengembangan Sapi. Berdasarkan Laporan yang diterima untuk rencana kegiatan tahun 2020 sebagai berikut, kegiatan Yandukeswan, Pembuatan Buku Yandukeswan, Pelatihan pembuatan pakan ternak, dan Study Komperatif kelompok ternak. Menurut kunjungan lapangan sampai Desember 2020 rencana kegiatan yang dimaksud telah diselenggarakan.

3.2 ~~Anggaran dan Realisasi~~

Jumlah anggaran yang dikelola tahun anggaran 2020 sejumlah Rp. 20.224.950,- dengan jumlah realisasi sebesar Rp. ~~2.814.000,-~~ atau sebesar ~~13,9%~~ dengan sisa anggaran sebesar Rp. ~~17.412.950,-~~. Sisa anggaran tersebut

disebabkan Anggaran tersedot untuk Penanggulangan Covid-19. Adapun rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	%
1	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.000.000	1.500.000	4.500.000	0,25%
3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.624.950	412.000	1.212.950	0,25%
6	Belanja Sewa sarana mobilitas darat	600.000	600.000	600.000	0%
11.	Belanja Makan dan Minuman rapat	3.025.000	3.025.000	3.025.000	0%
12.	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	8.675.000	900.000	7.775.000	10,3%
13.	Belanja Perjalanan Dinas luar daerah dalam provinsi	300.000	8.475.000	300.000	
Jumlah		20.224.950	2.812.000	17.412.950	

3.3 Kendala dan Solusi

Adapun kendala dan Solusi yang dialami dalam Pelaksanaan program pengembangan kawasan perdesaan kegiatan Pembinaan Potensi kawasan masyarakat perdesaan/nagari yaitu :

a. Kendala

- ✓ Kurangnya kerja sama BKAN, TK-PKP Kecamatan, BumNag Bersama, dan Nagari. terhadap kemajuan kawasan di Kecamatan Koto XI Tarusan
- ✓ Pernyataan Modal Nagari untuk Kawasan terkendala karena Covid-19
- ✓ Belum adanya intervensi Pemerintah Pusat Khususnya Dirjen PKP terhadap Kawasan Non KPPN.
- ✓ Kurang aktifnya BUMNag Bersama di Kawasan sehingga kurangnya pergerakan pengembangan Ekonomi dikawasan.

b. Solusi

- ✓ Diharapkan TK-PKP Kabupaten menyikapi kondisi Kawasan di Kecamatan Koto XI Tarusan.
- ✓ Diharapkan tahun depan adanya penyertaan modal dari nagari.
- ✓ Perlunya peran aktif dari nagari dan pihak kecamatan untuk lebih giat mencari peluang di tingkat kementerian/lembaga
- ✓ Diperlukan pelatihan terhadap pengurus BUMNag Bersama.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Kegiatan pembinaan potensi kawasan masyarakat perdesaan/nagari telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- ✓ Kawasan Perdesaan di Kabupaten Pesisir Selatan telah terbentuk 4 Kawasan yaitu 1) Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian Terpadu dengan Komoditi Unggulan Budidaya Sapi Potong di Kecamatan Sutera dengan nomor SK 050/492/Kpts/BPT-PS/2016 pada tanggal 26 Oktober 2016. 2) Kawasan Perdesaan Berbasis Integrasi Perkebunan Sawit dan Ternak Sapi Bali di Kecamatan Silaut dengan nomor SK 050/283/Kpts/BPT-PS/2017 yang ditetapkan pada tanggal 29 Mei 2017. 3) Kawasan Perdesaan Berbasis Industri Pariwisata di Kecamatan Koto XI Tarusan dengan nomor SK 050/402/Kpts/BPT-PS/2017 yang ditetapkan pada tanggal 6 September 2017 . 4) Kawasan Perdesaan Berbasis Padi dan Durian yang Terintegrasi dengan Pariwisata di Kecamatan Batang Kapas dengan Nomor SK 050/209/Kpts/BPT-PS/2019 yang ditetapkan pada tanggal 29 Maret 2019.
- ✓ Pembinaan dan Monitoring telah dilaksanakan Kecamatan Koto XI Tarusan sebanyak 2 Kali Perjalanan, Kecamatan Sutera sebanyak 2 Kali Perjalanan, Kecamatan Batang Kapas sebanyak 2 kali Perjalanan dan Kecamatan Silaut Sebanyak 1 Kali Perjalanan.
- ✓ Rapat Koordinasi telah dilaksanakan sebanyak 1 kali sebagai penunjang pengembangan kawasan yang telah dibentuk.

4.2 Saran

Adapun saran untuk keberlanjutan Program dan Kegiatan Pengembangan Kawasan Perdesaan adalah :

- ✓ Perlunya Pembinaan yang berkelanjutan untuk kecamatan yang telah dibentuknya Kawasan.
- ✓ Perlunya koordinasi dengan TK-PKP Kawasan untuk memaksimalkan pemerataan pembangunan di kawasan.
- ✓ Perlunya Tenaga Ahli pendampingan khusus Kawasan yang telah terbentuk

- ✓ Pembinaan berkelanjutan terhadap BUMNag Bersama sebagai penunjang perekonomian Kawasan.

Demikianlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2020, semoga dapat menjadi acuan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

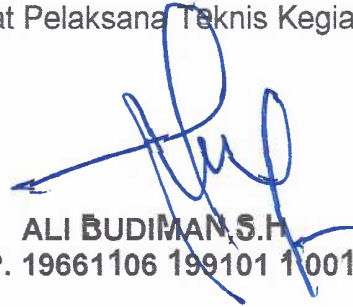
Painan, Januari 2021

Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

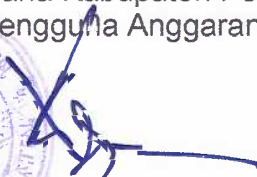


Dra. MERY EMILVA
NIP. 19670330 199302 2 002



ALI BUDIMAN, S.H.
NIP. 19661106 199101 1 001

Diketahui Oleh
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
Selaku Pengguna Anggaran



WENDI, S.H., M.Hum
NIP. 19760407 199803 1 005